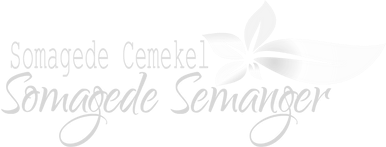


**KECAMATAN SOMAGEDE**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

K

E

C

A

M

A

T

A

N

S

O

M

A

G

E

D

E

**RENCANA KERJA**

**T**

**A**

**H**

**U**

**N**

2023

kecsomagede@gmail.com

Jalan Raya Somagede 09,

Somagede, Banyumas

# KATA PENGANTAR

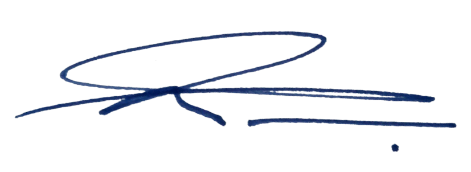
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daera, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Renja tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan masyarakat pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih.

Somagede, 25 Oktober 2022

CAMAT SOMAGEDE



**Drs. SAPTONO SUPRIYANTO**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650924 199503 1 002

# DAFTAR ISI

Halaman

[KATA PENGANTAR i](#_Toc112934775)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc112934776)

[**BAB I Pendahuluan** 1](#_Toc112934777)

[I.1. Latar Belakang 1](#_Toc112934778)

[I.2. Landasan Hukum 3](#_Toc112934779)

[I.3. Maksud Dan Tujuan 5](#_Toc112934780)

[I.4. Sistematika 6](#_Toc112934781)

[**BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu** 8](#_Toc112934782)

[2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renjaperangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8](#_Toc112934783)

[2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18](#_Toc112934784)

[2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23](#_Toc112934787)

[2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32](#_Toc112934803)

[**BAB III** **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan** 43](#_Toc112934805)

[3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 43](#_Toc112934807)

[3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 43](#_Toc112934808)

[3.3. Program dan Kegiatan 44](#_Toc112934809)

[**BAB IV** **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah** 52](#_Toc112934810)

[**BAB V Penutup** 57](#_Toc112934811)

# BAB I

**PENDAHULUAN**

## I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Somagede (Renja Kecamatan Somagede) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD ;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Somagede yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yaitu :

”**Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

* + 1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
    2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
    3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
    4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
    5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
    6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan
    7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
    8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Somagede Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

## I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Somagede dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Somagede dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Somagede selama tahun 2023.

## I.4. SISTEMATIKA

**BAB I PENDAHULUAN**

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan REnja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goalds ). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

**3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**3.2 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP**

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

# BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Somagede. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

1. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

***Evaluasi Program Tahun 2021***

*Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mewujudkan target Kinerja Kecamatan Somagede Tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah Anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp. 2.211.909.582,00 yang terdiri dari 5 ( lima ) program, 9 ( sembilan ) kegiatan.*

*Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebesar Rp. 2.005.798.445,00 ( 90,68% ) kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 28,66 %.*

*Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggungjawabnya yang terdiri dari 5 ( lima ) program dan 9 ( Sembilan ) kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyumas dipresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :*

T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

**Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

| **Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan** | **Satuan** | **Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023** | **Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021** | **Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target 2022** | **Realisasi 2022** | **Tingkat Capaian %** |
| Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | | | | | | | |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan |  | 86 | 90,81 | 85 | 86,25 | 101,47 |
| Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | | | | | | | |
|  | Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
|  | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun | Dokumen | 10 | 4 | 3 | 2 | 66,67 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
|  | Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan | Kegiatan | 12 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | Jenis | 9 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | |
|  | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | Orang | 15 | 12 | 15 | 12 | 80 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | |
|  | Jumlah pengelola keuangan SKPD | Orang | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah administrasi umum yang dikelola | Jenis | 18 | 6 | 6 | 5 | 85,33 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
|  | Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia | Jenis | 5 | 5 | 5 | 2 | 40 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
|  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Jenis | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
|  | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Jenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | |
|  | Jumlah logistik kantor yang tersedia | Bulan | 12 | 12 | 12 | 3 | 25 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | |
|  | Jumlah cetakan yang tersedia | Buah | 4 | 4 | 4 | 2 | 50 |
|  | Jumlah penggandaan yang tersedia | lbr | 90000 | 28030 | 30000 | 5186 | 17,29 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
|  | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | Kali | 1450 | 400 | 450 | 30 | 6.67 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Jenis | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia | Unit | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
|  | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | Bulan | 12 | 12 | 12 | 3 | 25 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
|  | Jumlah Pegawai Non ASN | Orang | 10 | 11 | 8 | 11 | 137,5 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan | Jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
|  | Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara | Unit | 9 | 9 | 9 | 4 | 44,44 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
|  | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 25 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | |
|  | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | |
|  | Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan | Jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | |
|  | pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani | Orang | 1500 | 2000 | 2000 | 770 | 38,5 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | |
|  | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | Desa | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | |
|  | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | |
|  | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Desa | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | |
|  | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Orang | 810 | 270 | 270 | 250 | 92,59 |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | |
|  | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | Kali | 96 | 24 | 36 | 9 | 33 |
| Peningkatan Efejtivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |
|  | Jumlah Fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Keg. | 36 | 12 | 12 | 3 | 25 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | |
|  | Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | |
|  | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Keg | 12 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | |
|  | Jumlah kegiatan pembinaan linmas | Keg. | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | |
|  | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenngaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Keg. | 12 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |
|  | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan | Unsur | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | |
|  | Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat | Kali | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | |
|  | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | |
|  | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Desa | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | |
|  | Jumlah Perdes dan Perkades yang terfasilitasi | Dokumen | 72 | 36 | N/A | N/A | N/A |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | |
|  | Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes | Kali | 57 | 19 | 19 | 9 | 47,37 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | |
|  | Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kali | 15 | 10 | N/A | N/A | 0 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | |
|  | Jumlah Desa yang menyampaikan Usulan ke Kabupaten | Desa | 9 | 9 | N/A | N/A | 0 |
| Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan | | | | | | | |
|  | Jumlah Desa yang ditetapkan Kawasan perdesaan | Desa | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |

Sumber : e monev 2022: form 1 triwulan II & form 2 2022 triwulan II

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

## Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
   1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
   2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
   3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;

b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;

c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
3. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
   2. pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
   3. pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
4. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
5. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
8. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terdiri dari:

* 1. Camat;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
     1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
     2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Seksi Pemerintahan Desa;
  4. Seksi Pelayanan;
  5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  6. Seksi Ekonomi Pembangunan;
  7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  8. Kelompok jabatan fungsional;

***Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023***

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja tahun 2023 sebesar Rp 2.327.419.000,00 terurai dalam 5 program dan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Kecamatan Somagede**

**Kabupaten Banyumas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek/Program/Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Akhir RPJMD** | **Realisasi Sampai Tahun 2022** | **Target 2023** |
| **PROGRAM 1** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | |
| 1.1 | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | % | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM 2** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | |
| 2.1 | Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM 3** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | |
| 3.1 | Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM 4** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | |
| 4.1 | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | % | 100 | 0 | 100 |
| **PROGRAM 5** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | |
| 5.1 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | % | 100 | 64 | 100 |

Sumber : E-monev Form 4 Triwulan II

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Somagede - Kabupaten Banyumas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator | SPM/stan dar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi  Capaian | | Proyeksi | | Catatan  Analisis |
| Tahun  2019 (thn n-2) | Tahun  2020 (thn n-1) | Tahun  2021 (tnn n) | Tahun  2023 (thn n+1 | Tahun  2020 (thn n-2) | Tahun  2021 (thn n-1) | Tahun  2023 (tnn n) | Tahun  2023 (thn n+1 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan |  |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 83,72 | 90,81 | 85 | 86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Somagede sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan kehumasan serta kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurusi hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tusinya.
26. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
27. Seharusnya yang menduduki jabatan perencanaan dan keuangan selayaknya mempunyai pengetahaun dan IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Soamgede menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

1. Strenght (Kekuatan)
2. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
3. SDM Kantor Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 24 orang ( 12 PNS dan 12 Non PNS ) yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 15 orang, Pendidikan D3 sebanyak 1 orang, Pendidikan SMA sebanyak 6 orang, Pendidikan SD sebanyak 1 Orang Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Somagede sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
4. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Somagede sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

1. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.
2. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Somagede juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Tanah yang ditempati milik Desa Somagede, bukan milik Pemkab Banyumas ;
2. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
3. Masih kurangnya disiplin ASN
4. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
5. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan
6. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawati untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
12. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Somagede tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya asporasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Somagede yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Somagede dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panajang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

***Tugas Kecamatan Somagede***

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

***Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede pada tahun 2023 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Somagede tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Somagede pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yag melek tekhnologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

**5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Somagede telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

TabelT-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Banyumas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
| **No.** | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target 2023** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif** | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Target 2023** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif** |
|
|
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **2.072.499.554** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **2.193.339.000** |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun | 3 dokumen |  | 3.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun Kecamatan Somagede | 5 dokumen |  | 2.939.000 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 3 dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.200.000 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.500.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.739.000 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Somagede | 10 jenis |  | 1.427.470.374 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Somagede | 10 jenis |  | 1.616.230.182 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 orang/bln | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.407.390.374 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/Bln | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.597.360.182 |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.080.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 18.870.000 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Somagede | 6 jenis |  | 166.484.940 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi Keuangan yang Dikelola Kecamatan Somagede | 6 jenis |  | 149.429.600 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.285.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 1.997.000 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 32.929.940 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 30.150.600 |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.743.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 4.303.000 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 64.265.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 49.818.000 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 15.875.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 15.284.000 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan konsultasi SKPD | 120 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 48.387.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan konsultasi SKPD | 120 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 47.877.000 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Somagede | 5 unit |  | 30.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Somagede | 5 unit |  | 8.000.000 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 30.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | I Unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 8.000.000 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Somagede | 2 Jenis |  | 396.244.240 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Somagede | 2 jenis |  | 375.240.218 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 36.183.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 36.182.978 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 16 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 360.061.249 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 290.061.240 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Somagede | 2 jenis |  | 49.300.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Somagede | 2 jenis |  | 41.500.000 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya | 9 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 33.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya | 10 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.900.000 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara | 20 Unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 15.800.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara | 20 Unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.600.000 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **14.805.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **12.180.000** |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Somagede | 2 Jenis |  | 14.805.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan Somagede | 2 Jenis |  | 12.180.000 |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 36 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 6.450.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 36 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.280.000 |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang diLimpahkan | 12 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 8.355.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang diLimpahkan | 9 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 6.900.000 |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **51.280.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **42.642.500** |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 9 desa |  | 51.280.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 9 desa |  | 42.642.500 |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7 Lembaga | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 17.500.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7 lembaga | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 12.600.000 |
|  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 26.280.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 3 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 21.660.000 |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 7.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 8.382.500 |
|  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **11.200.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **24.680.000** |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Unsur yang bersinergi dalamUpaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 4 unsur |  | 11.200.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Unsur yang bersinergi dalamUpaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 4 unsur |  | 24.680.000 |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 8.700.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.000.000 |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.500.000 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Laporan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 4.680.000 |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **45.700.000** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede** | **100 %** |  | **54.577.500** |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | 9 desa |  | 45.700.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | 9 desa |  | 54.577.500 |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 27 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 3 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 4.800.000 |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.200.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 15.300.000 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 8.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 29.077.500 |
|  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.000.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.400.000 |
| **JUMLAH** | | | | | **2.195.484.554** | **JUMLAH** | | | | **2.327.419.000** |

## 22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kecamatan Somagede akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Somagede maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator  Kinerja | Besaran/  Volume | Catatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapkebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

## 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Somagede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Somagede dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas

**“** **Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat ”** adalah sebagai berikut:

***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Somagede dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka ***sasaran pembangunan*** di Kecamatan Somagede adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Somagede beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **TUJUAN** | **SASARAN** |
| ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima*** | **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat** |

## 3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian SDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
5. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2023, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut :
   * + 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pagu : Rp. **2.193.339.000,-**

**Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 2.939.000,-

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 1.616.230.182,-

1. [Administrasi Umum Perangkat Daerah](http://103.105.190.19/rkpd/renja/update/tingkat/3/id/2243/parent/155)

Pagu Anggaran : Rp. 149.429.600,-

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 8.000.000,-

1. [Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah](http://103.105.190.19/rkpd/renja/update/tingkat/3/id/2245/parent/159)

Pagu Anggaran : Rp. 375.240.218,-

1. [Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah](http://103.105.190.19/rkpd/renja/update/tingkat/3/id/2246/parent/163)

Pagu Anggaran : Rp. 41.500.000,-

* + - 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pagu : **Rp. 12.180.000,-**

* + 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pagu Anggaran : Rp. 12.180.000,-

* + - 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pagu : **Rp. 42.642.500,0**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 42.642.500,-

* + - 1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pagu : **Rp. 24.680.000,-**

* + - * 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran : Rp. 24.680.000,-

* + - 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pagu : **Rp. 55.577.500,-**

* + - * 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 55.577.500,-

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Somagede

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas**

**Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Somagede**

**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Somagede**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikaor Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** | |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** |  | |
| **7** |  |  |  |  | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** |  |  |  | **KECAMATAN** | | | | | | | | **2,327,419,000** |  | | | | | **3,133,527,035** | |
| **7** | **01** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,193,339,000** |  | | | | | **2,964,266,635** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,939,000** |  | | | | | **3,239,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaina Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Dokumen | 100 % | 1,200,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 1,500,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaina Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Laporan | 100 % | 1,739,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 1,739,000 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,616,230,182** |  | | | | | **2,221,769,635** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 13 Orang/bul | an100 % | 1,597,360,182 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 2,187,069,635 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Dokumen | 100 % | 18,870,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 34,700,000 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **149,429,600** |  | | | | | **198,975,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Paket | 100 % | 1,997,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 4,570,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 6 Paket | 100 % | 30,150,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 38,000,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Paket | 100 % | 4,303,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 5,486,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 20 Paket | 100 % | 49,818,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 47,877,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 6 Paket | 100 % | 15,284,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 17,855,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 120 Laporan | 100 % | 47,877,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 85,187,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **8,000,000** |  | | | | **50,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Somagede | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit | 100 % | 8,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Somagede | 100 % | 50,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **375,240,218** |  | | | | **426,183,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 36,182,978 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 36,183,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Laporan | 100 % | 48,996,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 90,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 290,061,240 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Somagede | 100 % | 300,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **41,500,000** |  | | | | **64,100,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Somagede | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 10 Unit | 100 % | 20,900,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Somagede | 100 % | 45,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Somagede | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 20 Unit | 100 % | 20,600,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Somagede | 100 % | 19,100,000 |
| **7** | **01** | **02** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **12,180,000** |  | | | | **21,050,000** |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **12,180,000** |  | | | | **21,050,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan Somagede | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 36 Laporan | 100 % | 5,280,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede | 100 % | 11,450,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan Somagede | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 9 Laporan | 100 % | 6,900,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede | 100 % | 9,600,000 |
| **7** | **01** | **03** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **42,642,500** |  | | | | **67,520,000** |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **42,642,500** |  | | | | **67,520,000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 7 Lembaga | 100 % | 12,600,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede | 100 % | 25,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 21,660,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede | 100 % | 32,520,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Laporan | 100 % | 8,382,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede | 100 % | 10,000,000 |
| **7** | **01** | **04** |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **24,680,000** |  | | | | **14,890,400** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **24,680,000** |  | | | | **14,890,400** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Laporan | 100 % | 20,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede | 100 % | 9,890,400 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Laporan | 100 % | 4,680,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede | 100 % | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **06** |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **54,577,500** |  | | | | **65,800,000** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **54,577,500** |  | | | | **65,800,000** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Dokumen | 100 % | 4,800,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | 100 % | 7,500,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 7 Dokumen | 100 % | 15,300,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | 100 % | 20,800,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 29,077,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | 100 % | 30,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 5,400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede | 100 % | 7,500,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **2,327,419,000** |  | | | | **3,133,527,035** |

# BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**RANCANGAN AWAL RENJA**

Rencana Kerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dililhat pada tabel berikut:

**Matrik Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**

**KECAMATAN SOMAGEDE**

**Kabupaten Banyumas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Satuan | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting |
| Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana | | | | |
| Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  | **2.327.419.000** |  |  |  |  |
| **KECAMATAN** |  |  |  | **2.327.419.000** |  |  |  |  |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  |  |  | **2.193.339.000** |  |  |  |  |
|  | **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Somagede** |  | **100 %** |  |  |  |  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun Kecamatan Somagede |  | 5 Dokumen | 2.939.000 |  |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 3 Dokumen | 1.200.000 |  |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 3 Laporan | 1.739.000 |  |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Somagede |  | 10 jenis | 1.616.230.182 |  |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 13 orang/Bulan | 1.597.360.182 |  |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 4 Dokumen | 18.870.000 |  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum yang dikelola Kecamatan Somagede |  | 6 jenis | 149.429.600 |  |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 4 Paket | 1.997.000 |  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan |  | 6 Paket | 30.150.600 |  |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga |  | 4 Paket | 4.303.000 |  |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | 20 Paket | 49.818.000 |  |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | 6 Paket | 15.284.000 |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 120 Laporan | 47.877.000 |  |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Somagede |  | 5 unit | 8.000.000 |  |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia Kecamatan Somagede |  | 1 Unit | 8.000.000 |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Somagede |  | 2 jenis | 375.240.218 |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan |  | 12 Laporan | 36.182.978 |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan |  | 5 Laporan | 48.996.000 |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan |  | 12 Laporan | 290.061.240 |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Somagede |  | 2 jenis | 41.500.000 |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 10 Unit | 20.900.000 |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara |  | 20 Unit | 20.600.000 |  |  |  |  |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** |  |  |  | **12.180.000** |  |  |  |  |
|  | **Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Somagede** |  | **100 %** |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan  Kecamatan Somagede |  | 2 Jenis | 12.180.000 |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan |  | 36 Laporan | 5.280.000 |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan |  | 9 Laporan | 6.900.000 |  |  |  |  |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** |  |  |  | **38.302.000** |  |  |  |  |
|  | **Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede** |  | **100 %** |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Somagede |  | 9 desa | 42.642.500 |  |  |  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |  | 7 Lembaga | 12.600.000 |  |  |  |  |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |  | 2 Dokumen | 21.660.000 |  |  |  |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  | 4 Laporan | 8.382.500 |  |  |  |  |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** |  |  |  | **24.680.000** |  |  |  |  |
|  | **Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Somagede** |  | **100 %** |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Unsur yang Bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan |  | 4 Unsur | 24.680.000 |  |  |  |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  | 4 Laporan | 20.000.000 |  |  |  |  |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |  | 4 Laporan | 4.680.000 |  |  |  |  |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** |  |  |  | **54.577.500** |  |  |  |  |
|  | **Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede** |  | **100 %** |  |  |  |  |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Somagede |  | 9 desa | 54.577.500 |  |  |  |  |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |  | 3 Dokumen | 4.800.000 |  |  |  |  |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |  | 7 Dokumen | 15.300.000 |  |  |  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |  | 1 Dokumen | 29.077.500 |  |  |  |  |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |  | 1 Dokumen | 5.400.000 |  |  |  |  |

# BAB V

**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Kecamatan Somagede adalah **Program Tahunan** Kecamatan Somagede yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Kecamatan Somagede.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Somagede. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Somagede. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Somagede sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.